

PERUBAHAN SOSIAL
Sebuah Bunga Rampai

Sanksi Pelanggaran
Pasal 72 UU Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PERUBAHAN SOSIAL
Sebuah Bunga Rampai

Penerbit FISIP Untirta
Serang, 2011

PERUBAHAN SOSIAL

Sebuah Bunga Rampai

Editor: Agus Sjafari dan Kandung Sapto Nugroho

Copyright © 2011 FISIP Untirta

Desain Sampul : Anis Fuad

Tata Letak : Anis Fuad

Kredit Foto: <http://danielzaidi.blogspot.com/2010/06/si-pengemis-kota.html>

Penerbit: FISIP Untirta

Cetakan Pertama: April, 2011

ISBN 978-602-97365-1-9

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

FISIP Untirta

Jl. Raya Jakarta KM.4 Pakupatan Serang Banten

<http://fisip.untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip.untirta.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang terus memberikan rizki dan hidayahnya kepada seluruh manusia yang mengikuti ajarannya sehingga editor bisa menyusun buku PERUBAHAN SOSIAL: SEBUAH BUNGA RAMPAI guna menambah khasanah keilmuan dalam bidang ilmu sosial.

Buku ini terlahir dari pergulatan wacana dan gagasan dari para penulis yang tersampaikan pada sebuah diskusi akademis yang mengedepankan logika dan objektivitas, mengulas perubahan sosial dari berbagai sudut pandang, *social setting* yang beragam menjadi nilai lebih dalam buku ini, karena faktanya kita memang Negara yang sangat beragam. Pendekatan *social setting* ini akan membantu dalam melihat sebuah permasalahan.

Buku ini membahas secara multidisiplin mengenai fenomena perubahan sosial di masyarakat Indonesia, desain dan strategi untuk melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial dilihat dari sudut pandang budaya, media massa, politik, pendidikan, birokrasi, gender dan pemanfaatan ICT (Information and Communication Technology).

Buku ini terlahir dari sebuah diskusi. Oleh karena itu perbaikan dalam buku ini melalui kritik dan saran yang dialektik sangat diharapkan untuk koreksi dan perbaikan buku ini sehingga dapat lebih sempurna lagi dimasa yang akan datang.

Terakhir semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua. Perubahan sosial dapat pula merupakan hasil rekayasa. Maka diharapkan buku ini mempunyai peran untuk melakukan perubahan sosial yang lebih baik. Amin.

April 2011

Team Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
STRATEGI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERASING 'BADUY' Suatu Upaya Menuju Perubahan Oleh : Ahmad Sihabudin.....	1
PERGESERAN POSISI KEBUDAYAAN MELALUI GERAK LINTAS BUDAYA DI ERA GLOBALISASI Oleh: Suwaib Amiruddin.....	23
PARTISIPASI RAKYAT KUAT DI AKAR RUMPUT Studi Kritis Membangun Civil Society di Desa dan Kelurahan Oleh : Teguh Iman Prasetya.....	35
PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN MELALUI PENDEKATAN KELOMPOK Oleh: Agus Sjafari	45

PERANAN MEDIA MASSA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DEWASA INI Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Politik Media Oleh : Rahmi Winangsih.....	57
BIROKRASI, PEMILU DAN PERUBAHAN SOSIAL Oleh: Kandung Sapto Nugroho.....	75
MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN Oleh : Yeni Widyastuti.....	81
INTELEKTUAL, PERUBAHAN SOSIAL DAN IKAN ASIN Oleh : Abdul Hamid.....	105
ICT DAN REFORMASI ADMINISTRASI Menuju Perubahan Birokrasi di Indonesia Oleh : Anis Fuad	114

ICT DAN REFORMASI ADMINISTRASI Menuju Perubahan Birokrasi di Indonesia

Oleh:

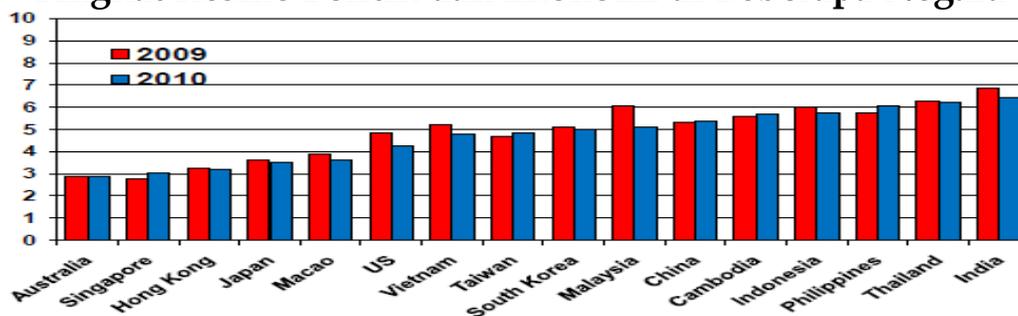
Anis Fuad

Pendahuluan

Menjadi rahasia umum bahwa birokrasi di Indonesia adalah lembaga yang dikenal sebagai salah satu institusi paling korup, lambat, tidak efektif dan efisien di Asia. Hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) tahun 2010 terhadap tingkat resiko ekonomi dan politik di suatu negara, mendudukan Indonesia pada salah satu posisi paling buruk di Asia bahkan dunia. Kesimpulan dari PERC bahwa ketidakmampuan Indonesia dalam menurunkan tingkat resiko politik dan ekonomi secara signifikan adalah karena permasalahan sistemik korupsi dan inefisiensi birokrasi.

Gambar 1.

Tingkat Resiko Politik dan Ekonomi di Beberapa Negara



Grades are scaled from zero to 10, with zero representing the best situation possible and 10 the worst.

Sumber : Executive Summary of Major Risks in 2010, PERC, Ltd

Padahal jauh-jauh hari Indonesia sebenarnya sudah melakukan berbagai strategi reformasi administrasi dan birokrasi. Beberapa paradigma perbaikan kinerja sudah diperkenalkan di Indonesia seperti New Public Management dan New Public Service. Dalam catatan Suharto (2010) sejak kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara di pimpin Taufik Efendi di tahun 2004, pemerintah sudah melakukan beberapa reformasi birokrasi hasil dari turunan dua paradigma di atas.

Reformasi administrasi dan birokrasi di Indonesia itu ditandai antara lain dengan penataan kelembagaan dan kepegawaian pemerintah, pengembangan SDM profesional dan disiplin, pengawasan komprehensif, perubahan mindset, pengelolaan sistem perencanaan dan penganggaran, perbaikan sistem keimigrasian, kepabeanaan, perpajakan, pertanahan, investasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Reformasi administrasi dan birokrasi tersebut tertuang dalam agenda strategis sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 yang meliputi penataan kelembagaan aparatur, penyederhanaan ketatalaksanaan, kepegawaian berbasis kinerja, sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), perbaikan pelayanan publik, pengembangan sistem pengawasan nasional, pengembangan budaya kerja aparatur negara, peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta membangun aparatur negara yang kredibel, akuntabel, transparan, dan terpercaya.

Namun hasil survey PERC diatas mematahkan semua usaha reformasi birokrasi di Indonesia. Faktanya korupsi sedang gencar-gencarnya menggrogoti kestabilan ekonomi dan politik di negara ini. Fakta terakhir terbongkarnya mafia kasus dan korupsi perpajakan yang menyeret berbagai kalangan dari pelaksana lapangan di Dirjen Pajak semacam Gayus Tambunan sebagai tokoh utama hingga pejabat tinggi lintas institusi publik seperti departemen keuangan, Kejaksaan, POLRI dan Kehakiman. Fakta diatas sesungguhnya hanya puncak gunung es yang dapat dilihat dan kemungkinan besar masih banyak fakta ketidak beresan birokrasi yang belum terungkap.

Visi reformasi administrasi dan birokrasi di Indonesia menginginkan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan misi reformasi administrasi dan birokrasi adalah membangun, menata ulang, menyempurnakan, membina, dan menertibkan birokrasi pemerintahan, agar mampu dan komunikatif dalam menjalankan peranan dan fungsinya.

Menurut Kuncoro (2008) target dan sasaran reformasi administrasi dan birokrasi ada lima hal. Pertama, terbentuknya, birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang anti KKN dan berkurangnya perilaku koruptif pegawai negeri. Kedua, birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas (*man, money, material, method, machine and time*). Ketiga, birokrasi yang transparan, yakni birokrasi yang seluruh kebijakan dan aktivitasnya diketahui masyarakat dan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Keempat, birokrasi yang melayani, yaitu birokrasi yang tidak minta dilayani, tetapi birokrasi yang melayani masyarakat. Kelima, birokrasi yang terdesentralisasi, yaitu kewenangan pengambilan keputusan terdesentralisasi kepada pimpinan unit kerja terdepan.

Lebih lanjut Kuncoro (2008) memaparkan bahwa ada empat bidang Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) yang mengalami proses reformasi (birokrasi) untuk mencapai lompatan peningkatan kualitas kinerja aparat pemerintahan yaitu pertama, penataan kelembagaan dan penyederhanaan ketatalaksanaan. Diadakan langkah penyesuaian “ukuran” secara tepat, antara kebutuhan organisasi dengan jumlah dan kualifikasi SDM yang semakin berdaya saing tinggi.

Kedua, peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui perbaikan jumlah, komposisi, distribusi PNS yang ada pada setiap instansi pemerintah. Di samping itu, juga diupayakan penyusunan dan penyempurnaan pola karier, system diklat, dan perbaikan system penggajian yang lebih adil, layak dan mendorong peningkatan kinerja. Ketiga, pencegahan dan pemberantasan KKN. Melalui akuntabilitas dan kepatuhan kepada aturan dan perundang-undangan yang berlaku, keteladanan dalam arti luas serta budaya malu. Sedangkan pemberantasan KKN diupayakan secara konsisten, konsekuen, dengan sanksi hukum seberat-beratnya. Keempat, Pengembangan pelayanan

prima yang lebih cepat, tepat, murah, memuaskan, tidak diskriminatif, bebas pungli dengan berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku melalui paradigma mengedepankan hak dasar warga negara.

Memperbaiki kualitas pelayanan birokrasi terhadap masyarakat adalah tema sentral reformasi birokrasi. Kuncoro (2008) mengurai bahwa kualitas pelayanan meliputi banyak hal seperti ketersediaan fasilitas fisik dan program (*tangibles*), realisasi program (*reliability*), kompetensi pelaksana pelayanan (*competence*), kesantunan dalam pelayanan (*courtesy*) keinginan untuk selalu memberikan pertolongan pada konsumen apabila memperoleh kesulitan untuk memperoleh layanan (*responsiveness*), kemampuan untuk bisa dipercaya dan diandalkan (*credibility*), keamanan dari resiko pelayanan yang buruk (*security*), kedekatan dan kemudahan untuk berhubungan dengan pelaksana layanan (*access*), kemampuan untuk membuat konsumen selalu terinformasi dengan baik tentang barang dan jasa yang diberikan (*communication*), dan kemampuan untuk selalu memahami keinginan pelanggan (*understanding the customer*). Kualitas pelayanan ini sepenuhnya dinilai berdasarkan persepsi masyarakat atas suatu jenis layanan.

Kuncoro (2008) menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efisien, bebas pungli dan berkualitas, penerapan teknologi praktis sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, inisiatif pemerintah untuk menerapkan teknologi dalam pelayanan publik menjadi sebuah langkah maju. Dasar hukum dalam penggunaan teknologi dalam reformasi birokrasi adalah Instruksi Presiden No. 6/2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Selain itu presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan e-government.

Pertanyaan penting pada kajian ini adalah seberapa penting peran ICT dalam reformasi administrasi dan Birokrasi di Indonesia? Mengapa sejak di terapkan penggunaan ICT dalam reformasi administrasi dan birokrasi di Indonesia, reformasi masih terkesan jalan di tempat?

Peran Penting ICT dalam Reformasi Administrasi

Menurut Killian (2008), sebagai alat reformasi, penggunaan ICT secara umum dan e-government secara khusus di desain untuk memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan warga masyarakat (*citizens*). Killian mengatakan:

“Technology is thought to make government more readily accessible and accountable. Research shows, however, that coherence among and within national and subnational levels of government and sufficient resources to develop and maintain e-government systems are critical to their success. Moreover, the nature of and extent to which information is shared with the citizenry is a function of the prevailing philosophy of public officials. Thus, although e-government can be a useful tool for obtaining and sharing public information, requesting public goods or services, and holding public officials more accountable for results, it can also serve the function of being little more than window dressing for public agencies wanting to appear more open or modern.”

Menurut Farazmand (2002: 101) Penggunaan ICT dalam reformasi Administrasi dan birokrasi adalah salah satu dari banyak faktor saling terkait yang mempengaruhi reformasi administrasi seperti banyaknya kritik terhadap sektor publik yang tidak efektif dan efisien, berubahnya teori-teori ekonomi, dampak berubahnya sektor swasta sebagai hasil dari globalisasi dan perubahan yang cepat dari teknologi.

Dari beberapa hasil kajian yang telah dilakukan beberapa ahli, penggunaan ICT, khususnya e-government mempunyai dampak yang positif terhadap bidang lain. Sudarto (2006) mencatat hasil penelitian ITU, setiap satu persen investasi dibidang TI akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi mencapai 3 persen. Penggunaan sumberdaya alam juga menjadi hemat, karena terjadi perubahan dari perkantoran berbasis kertas menjadi tanpa kertas (*paperless*). Dengan demikian penggunaan ICT diharapkan mampu mempercepat upaya memperbaiki birokrasi.

Hasil studi Kraemer dan King (2006) menyatakan bahwa penggunaan ICT adalah sebagai katalisator dan instrument penting dalam reformasi administrasi. Kraemer dan King (mengutip Fountain, 2002; Garson, 2004;

Gasco, 2003; Reineremann, 1988; Weiner, 1969) menjelaskan hubungan penggunaan ICT dalam reformasi administrasi,

"We define administrative reform as efforts to bring about dramatic change or transformation in government, such as a more responsive administrative structure, greater rationality and efficiency, or better service delivery to citizens. Toward these ends, governments historically have undertaken structural reforms, such as city-manager government; budget reforms, such as the executive; performance and program budgets; financial reforms, such as unified accounting; personnel reforms, such as merit-based employment and pay; and many others. Computing has been viewed as an instrument of such reforms and also as a reform instrument, per se. Such instruments are illustrated by urban information systems, integrated municipal information systems, computer-based models for policymaking, geographic information systems, and, most recently, e-government. The rhetoric of these computing-based reform efforts has been that computing is a catalyst that can and should be used to bring about dramatic change and transformation in government"

Penggunaan ICT dalam reformasi administrasi dan birokrasi sesungguhnya sudah jauh-jauh waktu diramalkan sebagai faktor penting dalam menciptakan administrasi publik dan birokrasi yang efektif dan efisien. Kraemer dan King (2006) menuturkan,

"The question of whether computers will bring significant organizational change is nearly half a century old. In a classic 1958 Harvard Business Review article, "Management in the 1980's", Leavitt and Whisler forecast that IT would replace the traditional pyramidal hierarchy in organizations with a lean structure resembling an hourglass, and productivity would soar through the elimination of most middle managers."

Laudon's (1974) yang dikutip Kraemer dan King (2006) berpendapat ICT secara umum dapat dipertimbangkan berpotensi untuk digunakan dalam reformasi administrasi. Sebagai contoh Fountain (2002) yang dikutip Kraemer dan King (2006) mengatakan, *"Technology is a catalyst for social, economic and political change at the levels of the individual, group, organization and institution."* Di era e-government saat ini, kita dapat

menyimpulkan bahwa penggunaan ICT dalam pemerintahan dapat mendorong pelaksanaan birokrasi lebih efektif. Kualitas yang baik dalam pelayanan publik, dan kemudahan akses publik terhadap informasi dan pelayanan yang disediakan pemerintah.

Dalam konsep reformasi manajemen publik salah satu dari Sembilan reformasi manajemen Bresser-Pereira (2004) adalah mengadopsi secara luas teknologi informasi khususnya teknologi internet untuk mengaudit, pembayaran pembelian hingga berbagai macam registrasi pelayanan. Lebih lanjut Bresser-Pereira (2004) mengatakan, *“The new information technology was the central underlying change. It reduced the costs and increased the speed of communications, enabling financial markets to work internationally in real time, and an international civil society to mobilize people for political causes.”*

Penggunaan ICT dalam penyelenggaraan Administrasi dan birokrasi dalam suatu negara merupakan keniscayaan dan merupakan fenomena global dari adanya globalisasi. Hal demikian tidak terkait sebuah Negara menganut ideology tertentu, tapi ada banyak manfaat yang diperoleh dari teknologi. Bresser-Pereira (2004) mengatakan,

“Its proponents use globalization as an ideology, while its adversaries criticize it as such. Yet to see globalization as an ideology is just wrong. The issue is not to be for or against globalization, but to understand its consequences and to try to develop policies that profit from the opportunities that it offers, while guarding against the threats that unrestrained markets may imply.”

Di Serbia, salah satu negara di Eropa timur juga melihat penggunaan ICT maupun pengetahuan sebagai factor kunci dalam keberhasilan kinerja dan produktifitas. Lilić dan Stojanović (2007) mengatakan bahwa dalam lingkungan ekonomi berbasis pengetahuan, ide e-governement sebagai dampak dari syarat efektifitas dan efisensi. Tiga elemen dasar yang dituju dalam pelaksanaan e-governement adalah a) menjamin pemerintah yang terbuka dan transparan pada aktifitas lembaga-lembaga pemerintah; b) Menyediakan pelayanan on-line yang memudahkan warga negara (citizens) menggunakan internet untuk membayar pajak, akses untuk mendaftarkan berbagai layanan (access registries), mempermudah

prosedur (make applications or undertake procedures), memilih wakil rakyat (elect their representatives), memberikan kritik dan saran (express their opinions) dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, serta c) menghubungkan berbagai lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas Lilić dan Stojanović, (2007) menyimpulkan bahwa E-government adalah element kunci dalam reformasi birokrasi di Serbia. Mereka mengatakan,

“The goal of e-government development is to secure an efficient path of the public administration to the 21 century and that citizens can conduct as many administrative procedures in the future through the Internet as possible. Such action would exclude unnecessary waiting and would save precious time. Within this context, e-government is the key part of public the administration reform strategy in Serbia.”

Pengalaman empiris lain dibuktikan oleh Ibei dan forje (2009) ketika ICT di pergunakan dalam Administrasi dan biorkrasi di Kamerun. Mereka lebih percaya bahwa reformasi administrasi dan akuntabilitas pelayanan publik dapat berjalan di kamerun jika menerapkan penggunaan ICT dan E-government. Ibei dan Forje menyebutkan bahwa dalam “The AFRICAN Governance programme”, beberapa *pilot project* di beberapa Negara Africa sudah melakukan pengenalan e-administration dan beberapa negara malah sudah mengimplementasikan. Khusus dalam proyek Telemedicine dapat dikatakan sukses dalam implementasinya di Kamerun.

Artinya, kamerun sebagai bagian negara di benua Afrika yang dikenal sebagai kawasan terbelakang dan salah satu negara dunia ketiga saja dapat merasakan manfaat yang lebih dari penggunaan ICT dalam adminsitration dan birokrasi di negara tersebut. Di Indonesia, dimana penetrasi ICT sudah mengalami kemajuan, seharusnya dapat menggunakan ICT secara maksimal dalam penyelenggaraan administrasi dan birokrasi.

Hambatan implementasi ICT dalam Reformasi Administrasi di Indonesia

Penggunaan ICT dalam reformasi administrasi dan birokrasi di Indonesia merupakan paket yang tak terpisahkan. Namun mengapa dalam pelaksanaannya ICT tidak dapat mendukung berjalannya reformasi administrasi dan birokrasi di Indonesia. Ada dua jawabannya, yaitu pertama, kesiapan dan kesungguhan SDM dalam menerima perubahan budaya kerja dimana penggunaan ICT menjadi sangat penting dalam pelaksanaan administrasi dan birokrasi. Kedua, pemahaman, kemauan dan kemampuan pemimpin dalam memanfaatkan ICT sebagai visi besar dalam menjalankan roda organisasi publik yang efektif dan efisien.

Pertama, jika kita menilik penetrasi penggunaan ICT di Indonesia, ada lompatan besar bahwa sesungguhnya masyarakat Indonesia sudah dapat menerima penggunaan teknologi sebagai bagian yang terpisahkan dalam kehidupan masyarakat (lihat Fuad, 2010). Contoh terbaru, dengan adanya aplikasi jejaring sosial di Internet semacam, Friendster, Twitter dan Facebook sesungguhnya penggunaan internet dan akses terhadap teknologi ICT di Indonesia melompat tajam menjadi 600 persen atau 6 kali lipat dari sebelumnya.

Dengan kata lain dengan beberapa intervensi dan strategi tertentu, sesungguhnya masyarakat sudah siap menerima perubahan budaya dalam bidang ICT. Namun pada pelaksanaan dilapangan belum ada upaya yang khusus dan serius oleh pemerintah Indonesia dalam penggunaan ICT untuk melayani masyarakat. Masih banyak SDM dalam birokrasi yang gagap teknologi ataupun ketika banyak aparat birokrasi sudah mulai mengenal teknologi, mereka bukan memanfaatkan teknologi untuk melayani masyarakat sebagai upaya efektifitas dan efisiensi malah menggunakan ICT hanya sebagai sarana hiburan belaka.

Penggunaan e-government oleh lembaga-lembaga pemerintah hanya sebatas menggugurkan kewajiban memenuhi syarat reformasi birokrasi tanpa melihat esensi. Malah, dalam kondisi tertentu e-government dipandang sebagai proyek yang menggiurkan karena merupakan program *high-cost* dimana membutuhkan investasi dengan dana besar sehingga membuka kesempatan bagi banyak kalangan khususnya birokrasi pelaksana untuk menjadikan lahan korupsi. Secara

statistik implementasi E-government di berbagai lembaga pemerintah dan daerah, 80 persen situs e-government hanya sebagai situs penyedia informasi dan belum pada tahap interaksi apalagi transaksi pelayanan (lihat, Rokhman, 2008). Dengan kata lain pencapaian efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan negara dan pelayanan publik masih jauh dari harapan.

Atau jika ingin mengetahui lebih jauh hambatan-hambatan e-government di Indonesia dapat dilihat beragam komentar yang secara keseluruhan menilai negatif implementasi e-government di Indonesia pada link ini, <http://virtual.co.id/blog/internet-marketing/e-goverment-yang-abai-komunikasi-online/>

Selain itu bukti ketidakseriusan penggunaan ICT dan e-government dalam pelayanan public di Indonesia adalah dengan melihat hasil riset lembaga penelitian Brokings tahun 2009 tentang pelayanan publik menggunakan media internet yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 175 dari 198 negara yang dinilai. Peringkat Indonesia dapat dibilang mengalami penurunan dan kemunduran. Tahun 2008, Indonesia berada di peringkat ke-170, dan tahun 2009 turun menjadi 5 level. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara terbawah dalam pelayanan pemerintah menggunakan media internet. Sementara Singapura menjadi yang termaju dengan menempati ranking ke-4. Atau bandingkan dengan dua negara terbelakang di Asia yaitu Afghanistan yang menduduki peringkat 76 dan Timor Leste yang berada diatas posisi Indonesia, yaitu diperingkat 156. (lihat www.yadmi.or.id).

Kedua, pemahaman, kemauan dan kemampuan pemimpin dalam memanfaatkan ICT sebagai visi besar dalam menjalankan roda organisasi publik yang efektif dan efisien. Menurut Kraemer dan King (2006) permasalahan utama penggunaan ICT adalah dari sisi pimpinan dalam mendistribusikan teknologi secara efesien, hal ini disebabkan ketidakpahaman pimpinan atas manfaat penggunaan teknologi pada sistem birokrasi. Kraemer dan King mengatakan,

“The main problem with the claim that information technology is an instrument of administrative reform is the lack of evidence to back it up. Faced with this, proponents respond that the potential of IT to produce reform is thwarted because of top management’s failures to distribute the

technology efficiently, to empower lower level staff, to re-engineer the organization along with computerization efforts, and to become hands-on knowledge executives themselves. Much of the benefit that IT could bring to organizations is lost due to poor management, but this does not explain the failure of the reform hypothesis."

Selain itu Noveck (2009:148) juga mengungkapkan hal yang hampir sama mengenai peran pimpinan pemerintah. Noveck mengatakan sangat penting untuk mengalamatkan pada peran pemimpin politik dalam mendorong inovasi dan reformasi berbasis teknologi dalam institusi pemerintah. Sebagai contoh administrasi Obama (*The Obama administration*) memberikan nama lembaga pemerintahannya sebagai "*the country's first chief technology officer*" yang meniatkan diri sebagai lembaga yang berperan secara spesifik dalam memimpin perubahan. Noveck lebih lanjut mengatakan tentang perhatian pemerintah Obama dalam memanfaatkan teknologi dalam pelayanan masyarakat, "*Because every leader has an imperative today to apply innovative, technologically enabled approaches to solve problems on the policy agenda, there is not necessarily a special focus on how technology can also help to create twenty-first-century institutions of governance."*

Jika dibandingkan dengan Indonesia, sangat sedikit pemimpin pemerintahan di Indonesia yang bervisi ke depan. Melayani masyarakat agar efektif dan efisien dengan memanfaatkan ICT. Banyak pemimpin yang gagap teknologi dan ketika pemerintah Indonesia mewajibkan pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan e-government di tiap daerah, e-government bukan dipandang sebagai terobosan baru pelayanan masyarakat namun menjadikan proyek yang menguntungkan. Sehingga menjadi tidak heran kualitas situs e-government di Indonesia hanyalah berfungsi sebagai brosur online belaka, tidak lebih. Manfaat yang diperoleh lebih sedikit dari biaya yang sudah dikeluarkan.

Simpulan

Pemanfaatan ICT dalam reformasi administrasi dan birokrasi di Indonesia mempunyai peran yang sangat vital demi mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel.

Pemanfaat ICT khususnya e-government merupakan salah satu faktor yang dapat mewujudkan *good governance*.

Pemanfaatan ICT dalam sistem administrasi dan birokrasi di Indonesia sudah dilakukan namun menghadapi masalah yang sangat sistemik yaitu SDM Birokrasi yang rendah dan belum memahami pentingnya pemanfaatan ICT dalam menjalankan roda birokrasi khususnya dalam melayani publik. Selain itu pemahaman, kemauan dan kemampuan pemimpin dalam memanfaatkan ICT sebagai visi besar dalam menjalankan roda organisasi publik yang efektif dan efisien masih sangat rendah. Penggunaan ICT khususnya *e-government* bukan dianggap langkah inovatif dalam pelayanan publik namun dianggap sebagai proyek besar yang menguntungkan. Ada “gegar paradigma” ketika secara global semua negara mewajibkan setiap pemerintah dalam melayani masyarakat dengan memanfaatkan ICT agar efektif dan efisien, sedangkan pimpinan di Indonesia masih menggunakan paradigm birokrasi tradisional. Maka ketika semua tidak berubah dan tidak berniat untuk berubah walupun perubahan itu terus mendorong, reformasi administrasi dan birokrasi di Indonesia hanyalah sekedar mimpi.

Daftar Pustaka

- Bresser-Pereira, Luiz Carlos, 2004, **Democracy and Public Management Reform: Building the Republican State**, Oxford University Press Inc.:New York
- Farazmand, Ali, 2002, *Administrative Reform In Developing Nations*, Praeger Publishers: Westport, CT
- Fuad, Anis, 2010, *Facebook dan E-Cognocracy*, dalam Radar Banten edisi Senin, 1 Maret 2010
- Ibei, John Egbe Dan John W Forje, 2009, *Challenges of Administrative Reforms and Public Service Accountability In Africa: The Case of Cameroon*. Cameroon Journal On Democracy An Human Rights Vol 3. No.1 June 2009
- Killian, Jerri, 2008, *The Missing Link in Administrative Reform: Considering Culture* dalam Jerri Killian dan Niklas Eklund (ed.), *Handbook of administrative reform : an international perspective*, CRC Press : Florida

- Kraemer, Kenneth dan John Leslie King, 2006, *Information Technology and Administrative Reform: Will E-Government be Different?* dalam International Journal of Electronic Government Research, 2(1), 1-20, January-March 2006
- Kuncoro, Andri Tri, 2008, *Reformasi Birokrasi : Studi Kasus Sragen*, di unduh dari <http://newblueprint.wordpress.com/2008/10/23/reformasi-birokrasi-studi-kasus-sragen/>
- Lilić, Stevan and Maja Stojanović, 2007, *E-Government and Administrative Reform in Serbia*, Masaryk University Journal of Law and Technology
- Noveck, Beth Simone, 2009, *Wiki Government: How Technology Can Make Government Better, Democracy Stronger, And Citizens More Powerful*, Brookings Institution Press: Washington D.C.
- Rokhman, Ali, 2008, *Potret dan Hambatan E-Government Indonesia*, Jurnal Inovasi Edisi Vol.11/XX/Juli 2008 diunduh dari <http://io.ppijepang.org/article.php?id=263>
- Sudarto, Yudo, 2006, *E-Goverment Dan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Baik* dalam *Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia*, Institut Teknologi Bandung
- Suharto, Didik G., 2009, *Reformasi birokrasi setengah hati*, Artikel pada Harian Solopos edisi Kamis, 08 April 2010, Hal.4

Sumber internet/website:

<http://virtual.co.id/blog/internet-marketing/e-goverment-yang-abai-komunikasi-online/>

http://www.yadmi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=267:indonesia-berada-di-ranking-ke-175-dalam-e-goverment&catid=38:terkini&Itemid=69